

RELASI SANTRI DAN KIAI DI PESANTREN AFILIASI NU (ANTARA KULTUR ETIKA ISLAM DAN ARISTOKRASI WARISAN)

ABDUL HAKIM

Dulhakeem.11@gmail.com

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

MOH. ZAINUL ARIF

zainul27arif@gmail.com

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Abstract

This article purpose to examine and criticize the tradition of relations between santri and kiai in Islamic boarding schools which are generally affiliated with Nahdlatul Ulama (NU). NU is likened to a large Islamic boarding school, while the Islamic boarding schools scattered throughout the archipelago are miniatures of NU. NU's progress and contributions are very diverse and are felt to this day, especially the struggle to expel the invaders in the archipelago, culminating in the momentum of the November 10 battle in Surabaya through the Jihad Fatwa (Resolution) issued by KH. Hasyim Asy'ari as Rais Akbar NU at that time. Another contribution of NU that has had a broad impact in the field of education is the existence of Islamic boarding schools which are estimated to have emerged in the 16th century AD. Islamic boarding school education is native to the archipelago and is claimed to be the oldest education system. Apart from being taught religious sciences such as jurisprudence, faith and morals, character education is also strongly instilled in Islamic boarding schools through direct education from a kiai. However, in practice, there is often an excessive cult of kiai due to several underlying factors, highlighted here is the aristocracy tradition inherited from the palace which is reflected in the santri's ethics towards kiai.



SOPHIST

Vol. 7 No.2 Juli – Desember 2025

Abdul Hakim dkk

Relasi Santri dan Kyai.

|55

Keywords: Nahdlatul Ulama, Islamic Boarding School, Cult

A. Pendahuluan

Di dalam struktur masyarakat Jawa, kiai termasuk kelompok elit yang dihormati dan disegani oleh santri dan rakyat.¹ Penghormatan masyarakat kepada Kiai bukan semata-mata didasarkan pada peran dan fungsinya, tetapi juga kedudukannya sebagai pemimpin agama dan pembimbing umat di dalam dinamika sosial politik dan ekonomi masyarakat, baik sejak masa penguasa kerajaan tradisional Jawa maupun masa sekarang.²

Tentu hal ini cukup beralasan, karena secara individual sosok kiai pada umumnya menampakkan kualitas dan kapasitas dirinya, baik dalam penguasaan ilmu agama maupun kualitas moralnya (ketinggian akhlak, ketekunan dalam menjalankan ibadah) serta pengabdian dirinya kepada agama dan masyarakat. Ketinggian ilmu dan keluhuran budi pekertinya, cermin dari sikap kiai yang hidup sederhana dan membuka dirinya kepada masyarakat dengan harapan dapat membantu memecahkan persoalan umat, baik yang menyangkut persoalan agama maupun persoalan sosial.

¹ Zamakhshyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 1982), 56. Ia mendefinisikan kiai sebagai gelar yang diberikan masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren serta mengajarkan kitab klasik Islam kepada santri

² Ibnu Qayim Ismail, Kiai Penghulu Jawa: Perannya di Masa Kolonial (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 2. Di antara kedudukan itu adalah dewan Perampara (Penasehat tinggi kerajaan), pegawai pengadilan dan penghulu di dalam birokrasi pemerintah Hindia Belanda.



Tentunya modal ilmu dan amal shaleh secara psikologis, kepribadian kiai banyak menarik simpati santri dan masyarakat itu dapat berwujud. Pertama, kesetian dan pengabdian kepada kiai dan keluarganya. Kedua, kepercayaan dan keyakinan tentang apa yang dimiliki serta yang diberikan oleh kiai, baik yang berupa amalan (ijâzah) maupun materi (azimat) memberikan pengaruh dalam hidupnya.

Ketiga, Penghormatan kepada kiai karena jasa yang diperbuatnya. Gejala simpati dapat dirasakan, bila di amati dari dekat perilaku masyarakat yang hidup di sekeliling lingkungan pesantren maupun perilaku santri yang berada di dalam struktur format pesantren itu sendiri. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) lahir karena eksistensi pesantren yang mendidik dan mengkader ulama yang tidak hanya mahir penguasaan terhadap ilmu keagamaan, tetapi juga terpupuk rasa cinta tanah air sebagai implementasi jiwa nasionalisme dan patriotisme. Maka keberadaan pesantren dan lingkungannya tidak terlepas dari Nahdlatul Ulama (NU)

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku sejarah pesantren, karya tokoh Nahdlatul Ulama, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang membahas relasi antara santri dan kiai. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi budaya dan nilai-nilai yang membentuk relasi



tersebut, khususnya pengaruh warisan aristokrasi keraton yang tercermin dalam etika penghormatan santri terhadap kiai. Literatur yang digunakan mencakup karya KH. Hasyim Asy'ari, studi tentang Resolusi Jihad, serta analisis historis pendidikan pesantren di Nusantara.³

Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu mengidentifikasi dan menginterpretasi gagasan utama dalam teks-teks yang dikaji. Penulis menelusuri jejak historis dan ideologis dari relasi santri-kiai dalam konteks pesantren NU, serta mengkritisi praktik pengkultusan yang muncul akibat konstruksi sosial dan budaya tersebut. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber dan pendekatan kritis terhadap wacana dominan dalam literatur pesantren. Sebagai landasan metodologis, penulis merujuk pada buku-buku metode penelitian kualitatif untuk memperkuat kerangka analisis, seperti karya Sugiyono dan Moleong⁴. Dengan metode ini, artikel berupaya mengungkap secara mendalam bagaimana tradisi pesantren membentuk struktur sosial dan otoritas keagamaan yang khas di lingkungan NU.

C. Pembahasan

1. Sejarah Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU), Peran, dan Kontribusinya

³ Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*; Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* jilid I dan II.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).



Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Organisasi ini lahir dari rahim kaum santri yang pada mulanya merupakan pergerakan untuk melawan kolonialisme dengan nama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Selanjutnya pada tahun 1918 berubah menjadi Tashwirul Afkar atau dengan sebutan lain Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran) yang berperan sebagai wadah pendikan sosial politik. Setelah itu lahirlah Nahdlatut Tujjar (Pergerakan Kelompok Saudagar) yang dijadikan tumpuan untuk meningkatkan taraf ekonomi warga.

Ketika Arab Saudi dipimpin oleh raja Ibnu Saud yang mengusung faham keagamaan tunggal secara puritan (wahabisme) dan diterapkan sebagai perundang-undangan resmi (*qanun*) negara, serta adanya gagasan untuk menghancurkan situs-situs keagamaan dan budaya warisan terdahulu (termasuk makam Rasulullah Saw, keluarga, dan para sahabat) karena dianggap sebagai tindakan bid'ah dan syirik saat dikultuskan dan diziarahi, ulama dari kalangan pesantren merespon dan bereaksi terhadap gagasan raja Ibnu Saud tersebut dengan menolak penghancuran situs budaya dan agama. Lain halnya dengan kalangan Muhammadiyah yang terepresentasi oleh KH.Ahmad Dahlan dan PSII pimpinan H.O.S Tjokroaminoto yang mendukung penuh gagasan raja Ibnu Saud. Imbas dari respon dan reaksi tersebut, tokoh dari kalangan pesantren dikeluarkan dari



anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925, dan otomatis pula tidak dilibatkan sebagai delegasi pada Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam International) di Mekah.

Terdorong kuat untuk memperjuangkan sistem kebebasan bermazhab dalam beragama (menolak asas tunggal melalui ajaran wahabi) dan peduli terhadap situs warisan peradaban, maka kalangan pesantren membentuk komite hijaz yang digawangi oleh KH.Wahab Hasbullah untuk mengikuti Kongres Islam International tersebut. Atas usulan kuat dan desakan dari kalangan pesantren yang terwadahi dalam komite hijaz, serta gemuruh penolakan dari umat islam dari berbagai penjuru dunia, raja Ibnu Saud mengurungkan rencananya berupa menghancurkan situs warisan peradaban dan Mekah terbebas dari ajaran Tunggal wahabisme, yang pada akhirnya boleh mengamalkan ajaran keagamaan sesuai madzhab masing-masing di Mekah pada khususnya. Itulah torehan kontribusi internasional ulama pesantren yang bedampak hingga kini.

Berawal dari pembentukan komite hijaz atas respon dan reaksi rencana raja Ibnu Saud tersebut, organisasi ad hoc ini selanjutnya berubah menjadi Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1244 H yang lebih mengakomodasi secara sistematis perkembangan dan tantangan zaman, khususnya mencakup isu keislaman. Organisasi ini dipimpin oleh KH.Hasyim Asy'ari sebagai jabatan Rais Akbar setelah kesepakatan permusyawaratan para ulama.



KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) dalam meneguhkan prinsip berorganisasi di tubuh Nahdlatul Ulama, selanjutnya KH. Hasyim Asy'ari juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Khittah Nahdlatul Ulama yang menjadi dasar dan rujukan warga NU (*nahdlyyin*) dalam berpikir dan bertindak dalam tataran keagamaan, sosial, dan politik.

2. Fatwa Jihad Ala Nahdlatul Ulama (Resolusi Jihad)

Melawan Penjajah dan Sekutu

Peran dan kontribusi ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama sangatlah panjang dan urgensi terlebih jika dikaitkan dengan perjalanan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, ulama dianggap ideal perannya dalam pergerakan dan perubahan di masyarakat sebagai pembina dan panutan masyarakat yang begitu disegani dan diikuti pendapatnya⁵. Salah satu ulama yang menjadi tokoh sentral dan panutan di kalangan Nahdlatul Ulama adalah KH.Hasyim Asy'ari (bergelar Hadratussyaikh)⁶, selain

⁵ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 87

⁶ Gelar ini disematkan kepada KH. Hasyim Asy'ari saat tinggal dan mengajar di Makkah al-Mukarramah. Hadratussyaikh artinya “Maha Guru” menjadi gelar yang diberikan secara khusus untuk pribadi yang benar-benar dianggap layak mendapatkannya dalam hal keilmuan. Lihat Tebuireng Online: <https://tebuireng.online/asal-usul-gelar-hadratussyaikh-untuk-kh-hasyim-asyari/>



menjabat sebagai Rais Akbar NU dan pengasuh pesantren yang muridnya ribuan saat itu, beliau juga mampu menggerakkan massa yang begitu massif di skala nasional dalam mengkomando dan mengawal perjuangan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Gerakannya yang sulit dibaca oleh lawan (penjajah) ini dianggap ancaman nyata. Gerakan beliau disebut sebagai underground movement secara terstruktur dan massif mampu memporakporandakan pertahanan lawan⁷.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pihak penjajah kembali berencana menguasai Indonesia lagi dipicu pecahnya perang dunia ke-2 lewat aneksasi blok Asia. Kedatangan penjajah kali ini melibatkan sekutu sehingga kekuatan dan logistik untuk menyerang kedaulatan Indonesia tidak main-main. Hal ini memanti rasa patriotisme KH.Hasyim Asy'ari untuk mengusir kembali penjajah dari tanah air beranggapan bahwa penjajahan dan penindasan merupakan tindakan yang menyalahi hak asasi manusia serta bertentangan dengan ajaran agama Islam, selain itu dakwah islam tidak akan berhasil dan terhalang sebab keberadaan penjajah di bumi Nusantara.

KH.Hasyim Asy'ari kali ini lebih berstrategi agar pergerakan dan perlawanannya berhasil. Jejaring ulama dan masyarakat pribumi dilibatkan dan menyulut semangat yang begitu menggelora terlebih ketika KH.Hasyim Asy'ari

⁷Muhammad Fahmi Hidayatullah, “Underground Movement KH. Hasyim Asy'ari (Konsepsi, Interpretasi dan Aksi Politik Kaum Santri), dalam Pusat Kajian Hasyim Asy'ari, Aktualisasi Pemikiran dan Kejuangan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2018), 260.



mengeluarkan fatwa dan menyerukan untuk melawan penjajah⁸. Fatwa heroik tersebut dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. fatwa itu kemudian terkenal dengan fatwa resolusi jihad. Dalam fatwa tersebut KH. Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa tidak ada pemerintahan yang sah selain pemerintahan Indonesia, kembalinya Belanda ke tanah air dengan tujuan ingin menjajah merupakan musuh nyata yang harus diperangi, Seluruh umat Islam terutama dari kalangan Nahdliyin harus ikut serta berjuang dengan jiwa raga mengusir Belanda yang ingin kembali mencekram tanah air, berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan jiwa dan raga adalah sebuah perang suci, jihad fisabilillah bagi setiap orang Islam yang berada dalam radius 94 KM, sedangkan mereka yang di luar radius tersebut wajib membantu mereka yang berjuang dengan harta bendanya⁹

Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH.Hasyim Asy'ari ini berdampak sangat luas dan mampu menghegemoni Masyarakat dari berbagai kalangan, dan berangkat dari fatwa tersebut, ulama dari Nahdlatul Ulama lingkup pulau Jawa dan Madura yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah selaku panglima Laskar

⁸ Zainul Milal Bizawe. “*Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama Santri*”. (Tangerang: Yayasan Compass Indonesiatama, 2016)

⁹Lathiful Khuluq, “*Fajar Kebangunann Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy'ari*” (Yogyakarta: LKIS, 2009), 143-144.



Huizbullah mengadakan perkumpulan untuk menindaklanjuti isi fatwa tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari.

Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama terepresentasi oleh KH. Hasyim Asy'ari dinilai berhasil dan sukses mengalahkan lawan dan mengusirnya, hal ini karena mobilisasi massa yang begitu besar dan sikap heroik yang ditanamkan oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan masih banyak lagi kiai-kiai lain yang berkontribusi. Keberhasilan Resolusi Jihad dalam memobilisasi massa disebabkan karena beberapa hal, pertama karena adanya momentum Proklamasi tahun 1945, yang kedua terjadinya pergerakan dan hegemoni yang besar-besaran di kalangan pesantren yang mana mereka menganggap bahwa perang melawan penjajah merupakan jihad *fi sabilillah* yang hukumnya adalah *fardlu 'ain* alias wajib secara personal bagi kaum muslimin (yang mampu) yang berada di dalam radius yang telah ditentukan di naskah Resolusi Jihad, maka lahirlah laskar Hizbulah, Sabilillah, PETA, dan barisan ulama. selain itu mereka berkeyakinan apabila gugur di medan pertempuran, maka dinilai sebagai orang yang mati syahid, dan ketiga bahwa Resolusi Jihad merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa dan bereputasi tinggi di kalangan pesantren sehingga berhasil memantik semangat juang



yang begitu besar.¹⁰

Peran dan kontribusi Nahdlatul Ulama sangatlah panjang dan beragam, selain yang disebutkan di atas, Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam pembentukan dan pengesahan bentuk negara Indonesia berupa Pancasila sebagai asas tunggal dalam bernegara lewat representasi KH. Wahid Hasyim, juga turut andil dalam mewarnai dinamika politik mulai sistem pemerintahan (eksekutif, legislative, dan judikatif) dari jaman orde lama (karena NU pernah menjadi partai politik), berkontribusi besar di dalam menumpas gerakan komunis tahun 1948 dan 1965 (G30SPKI), mendidik dan membimbing masyarakat khususnya akar rumput, mendirikan berbagai pondok pesantren yang bertebaran seantero Nusantara, mendirikan lembaga pendidikan formal, pemberdayaan bidang sosial, keagamaan, hingga ekonomi umat dan lain sebagainya.

3. Politik dalam Nahdhatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (jam'iyyah) terbesar di Indonesia. ¹¹Awal kelahiran NU sendiri tidak

¹⁰ Jafar ahmad, “*Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2022), 93.

¹¹ Hasani Ahmad Said. *Islamic Relations, Local Tradition (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and The Ethnic Baduy) and Their Effects On Religious Life Patterns In*



dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesia-an. pada realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para ulama dalam memperjuangkan “tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia”. NU dilahirkan oleh ulama pesantren sebagai wadah persatuan bagi para ulama serta para pengikutnya, guna mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, dalam realitas ke-Indonesiaan, kelahiran NU merupakan bagian dari pengaruh politik etis yang diterapkan Belanda dalam konteks perjuangan mewujudkan kemerdekaan.

4. Sejarah Politik Nahdhatul Ulama

Dalam perjalannya, pelan-pelan NU memulai langkahnya berkiprah dalam dunia politik. Berawal dari MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), NU akhirnya terlibat dalam masalah-masalah politik. Namun, eksistensi MIAI tidak berlangsung lama, pada Oktober 1943, MIAI akhirnya membubarkan diri dan digantikan oleh Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi, setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya ditahbiskan menjadi partai politik, dan



memutuskan NU sebagai tulang punggung Masyumi.¹²

Pada tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik banyak terjadi di dalamnya. Dan hal tersebutlah yang telah menyebabkan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, NU berhasil mendapatkan suara yang cukup besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen pada pemilu 1955. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang cukup besar. Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas dilingkungan kaum santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya. Melihat sejarah di atas, dapat dikatakan bahwa NU memiliki pengalaman dan basis politik yang kuat. Namun, pada tahun 1983, atas hasil Munas ke-86, telah diputuskan bahwa NU sudah tidak lagi berkecimpung didalam politik dan menjadi organisasi keagamaan yang murni. Tetapi perlu diketahui bahwa hal tersebut tidak menghilangkan status NU sebagai organisasi massa yang besar dan solidaritas massa yang kuat. Hal tersebut terbukti pada pemilu pasca orde baru

¹² NU Online. Kilas NU dan Politik. <https://www.nu.or.id/opini/kilas-nu-dan-politik-q9jRI>. Diakses Ahad, 12 Mei 2024.



tahun 1998, dimana pada pemilu 1998, PKB yang merupakan partai baru dan partai yang menjadi wadah berpolitik warga NU, memperoleh suara yang cukup besar.

Kesatuan suara warga NU untuk memilih PKB sebagai wadah berpolitiknya tidak berlangsung lama, karena pada pemilu 2009, PKB mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik internal antar para elite yang ada didalam tubuh PKB, dan kemudian berakibat pada perpecahan di basis massa PKB khususnya warga NU. Seperti yang telah diketahui bahwa ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga kekuatan NU, yaitu Kiai, Pesantren, dan aktor politiknya. Konflik kepentingan sebenarnya tidak hanya terjadi di masa PKB.

Pada saat NU masih berkecimpung dalam dunia politik konflik kepentingan juga sering terjadi, seperti pada saat NU masih bergabung dengan Masyumi dan PPP. Dan sebenarnya, karena hal-hal tersebutlah NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926. NU merasa bahwa dengan terlalu asyik dalam politik, NU telah melalaikan tugas-tugas sosial keagamaan dan pendidikan.

Orientasi praktis yang serba politis itu mengakibatkan NU terjerumus kedalam pola yang serba taktis politis untuk memperebutkan keuntungan politik yang sifatnya hanya sementara. Sikap dan tindakan NU selalu dikaitkan dengan orientasi untung rugi dari segi kepentingan politik semata. Selain itu, dengan terjun ke dalam politik, NU takut akan kehilangan



tujuan utamanya, yaitu mempersatukan umat Islam ke dalam suatu wadah yang bernama NU, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam politik. Oleh karena itu, pada pemilu 2014 NU tidak lagi menjadi alat pencapai kepentingan para elite-elite politik, yang hanya memanfaatkan kekuatan solidaritas massa NU. Dan menjadikan warga NU yang berada dibawah tercerai berai karena kepentingan para aktor politiknya.

Partai Nahdlatul Ulama (NU) mendulang hasil manis pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan persiapan yang cukup singkat, sebagai partai politik (NU keluar dari Masyumi pada April 1952, untuk kemudian menjadi parpol) mampu meraih hasil 3 besar pada Pemilu 1955. Dari data yang Najmuddin (2024) dapatkan dari website KPU, Pemilu 1955 memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Konstituante. Pada artikel ini, penulis akan memaparkan hasil perolehan untuk anggota DPR RI. Dari perolehan hasil Pemilu 1955, partai-partai yang masuk 3 besar yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan NU. Tiga besar partai memperoleh suara: PNI (8.434.653 atau 22,32 %) Masyumi (7.903.886 atau 20,92 %) dan NU (6.955.141 atau 18,41%). Sedangkan untuk perolehan kursi tiga besar DPR RI, PNI (57 kursi), Masyumi (57), dan NU (45).¹³

¹³Ajie Najmuddin. *Inilah 45 Anggota DPR Partai NU Hasil Pemilu 1955*. <https://www.nu.or.id/fragmen/inilah-45-anggota-dpr-partai-nu-hasil->



5. Prinsip-prinsip dan Paradigma Politik Nahdhatul Ulama

Seperti umumnya ajaran Islam tradisional yang lain, NU juga mengambil gagasan politik Sunni klasik untuk dijadikan rujukan teoritis utama. Pemikiran-pemikiran al-Mawardi, al-Ghazali, al-Baqillani, dan yang lainnya banyak ditemukan dalam teks-teks NU. Mayoritas petinggi NU pada 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren, yang mata ajarannya adalah ilmu fikih. Dan bagi kaum tradisionalis, fikih merupakan ratu ilmu pengetahuan.¹⁴

Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme. Ketiga kategori ini saling berhubungan dan dalam tingkatan yang berbeda berdasarkan pada prinsip-prinsip fikih.¹⁵

Istilah kebijakan dalam hal ini digunakan untuk pengertian yang netral, yaitu pengambilan tindakan yang kondusif bagi upaya manfaat atau menghindari kerugian. Ciri kedua dari pemikiran politik NU adalah sikap luwes. Keluwesan dalam

[pemilu-1955-Xoebh](#). Selasa, 27 Februari 2024 | 10:13 WIB. Diakses Kamis, 9 Mei 2024.

¹⁴ Martin Van Bruinessen, NU, *Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), p.168. Baca juga Achmad Warid. Fiqih politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan. *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 43 No. I, 2009.

¹⁵ Masmuni Mahatma. *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegrave*. Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 45



pengembalian keputusan itu sebagian merupakan wujud penerapan kaidah fikih. Suatu krisis memerlukan perhitungan-perhitungan baru tentang keuntungan dan kerugian sehingga sikap atau posisi sebelumnya dapat dipertimbangkan kembali. Sedangkan moderatisme dapat diartikan sebagai suatu keinginan menghindari tindakan yang ekstrim dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan pendapat. Dan dalam wacana NU secara makro, gagasan tersebut digambarkan secara jelas. Perilaku moderat terutama kecenderungan untuk memilih cara yang umum disebut sebagai ‘pendekatan jalan tengah’, ditemukan dalam pemikiran Islam maupun ciri ideal budaya Jawa.

Dalam tataran historis maupun normatif ajaran, Islam dan politik mempunyai hubungan terkait yang sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan, bila keduanya dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia. Politik yang dipahami hanya sebagian dan tidak menyeluruh, tentu akan mengaburkan makna dan menafikan sumbangsih Islam terhadap dunia politik itu sendiri. Dengan demikian Islam perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka paradigmatik yang bersifat dinamik dalam pemikiran politik.¹⁶

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga Dunia, Nahdlatul Ulama bukanlah organisasi politik dengan orientasi

¹⁶ Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), pp. 1-2.



kekuasaan. Sejak awal didirikannya oleh Hadratussyekh KH Hasyim As'ary pada tahun 1926 NU adalah organisasi (jam'iyyah diniyyah ijtimaiyyah) keagamaan dan sosial kemasyarakatan. NU didirikan oleh para kiai dan kiprah para kiai NU dalam percaturan politik dari dulu hingga sekarang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan, meneguhkan NKRI, menjaga stabilitas negara, dan mewujudkan kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam praktik politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Praktik politik ini digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh dengan nama politik tingkat tinggi (siyasah 'aliyah samiyah) Nahdlatul Ulama. Praktik politik ini demi menjaga Khittah NU 1926 yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam Munas NU 1983 di Situbondo, Jawa Timur.¹⁷

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa. Sebab NU dilahirkan tidak hanya ditujukan kepada jamaahnya, namun bagaimana NU bisa memberikan sumbangsih kepada bangsa. Dan NU telah berusaha ikut serta dalam menawarkan jalan keadaban yang bisa diberikan kepada umat maupun bangsa ini sedari awal sejarah kelahiran dan dinamika eksistensinya. Pertama, NU telah merumuskan konsep mabadi' khoiro ummat

¹⁷ Nu Online. *Mengenal 9 Pedoman Politik Warga NU*.
<https://jabar.nu.or.id/nasional/mengenal-9-pedoman-politik-warga-nu-XKpLQ> Rabu, 13 September 2023 | 10:00 WIB. Diakses Kamis, 9 Mei 2024.



(prinsip dasar umat terbaik) yang didasarkan pada orientasi moral sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Pengukuhan moralitas tersebut bertumpu pada as-shidq (kejujuran) dan al-amana (tanggung jawab). Kedua, dalam ranah keagamaan, NU telah berhasil merumuskan gagasan dasar tentang tawassuth (moderat), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan).¹⁸ Ketiga, NU telah memelopori penerimaan dan pengamalan Pancasila sebagai asas bernegara dan bermasyarakat yang bisa diterima oleh warga negara Indonesia yang majemuk. Atas dasar semua ini NU wajib memelihara dan mempertahankan asas-asas dasar kenegaraan yang telah dirumuskan oleh para pendahulu, melalui darah para syuhada dan tinta para ulama, selaku pewaris para Nabi Allah.¹⁹

Proses yang dinamis dalam tubuh NU di negara ini seperti sebuah perahu yang mendayung diantara dua pulau, yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan keumatan sekaligus dan kekuatan politik (political power) berbasis massa atau umat yang terus melekat dalam gerakan-gerakan kultural, nalar, dan aktualisasi spirit sosial kebangsaannya. Tak berlebihan jika seorang tokoh Dawam Rahardjo mensinyalir bahwa dalam kenyataan sejarah

¹⁸ Baca juga Hasani Ahmad Said, dkk. *Harmonization of Culture and Religion: Comparison of Baduy and Nahdlatul Ulama Traditions*. Jurnal Al-Ulum Volume 20 Number 2 Desember 2020 ISSN 1412-0534, E ISSN 2442-8213 399 P. 399

¹⁹ Masmuni Mahatma. *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara*. Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 31



perkembangan politiknya, NU justru tidak menampakkan konservatismenya, terutama sekali menyangkut perilaku sosial politiknya.

Melansir NU Online, menurut Kiai Sahal Mahfudh, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. Sedangkan NU sebagai lembaga atau organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Kedulian NU terhadap politik diwujudkan dalam peran politik tingkat tinggi (siyasah ‘aliyah samiyah), yakni politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitik.

Sejarah mencatat, NU memang pernah memutuskan menjadi partai politik pada 1952. Kemudian tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh NU sebagai partai. Berjalannya waktu, keputusan NU menjadi partai politik pada tahun 1952 turut mendegradasi peran dan perjuangan luhur organisasi karena lebih banyak berfokus ke percaturan politik praktis sehingga pengabdian kepada umat seolah terlupakan.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, para kiai mengusulkan agar NU secara organisasi harus segera kembali Khittah 1926. Usulan tersebut sempat terhenti. Namun, seruan kembali ke Khittah 1926 muncul kembali pada tahun 1971. Kala itu Ketua Umum PBNU KH Muhammad Dahlan memandang langkah tersebut sebagai sebuah kemunduran secara historis. Pendapat Kiai Muhammad Dahlan itu coba ditengahi oleh Rais Aam KH Abdul Wahab Chasbullah bahwa kembali ke khittah



berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan, bukan kembali secara harfiah. Setelah seruan kembali ke khittah sempat terhenti kala itu, gema tersebut muncul lagi pada tahun 1979 ketika diselenggarakan Muktamar ke-26 NU di Semarang, Jawa Tengah. Seperti seruan sebelumnya, usulan untuk kembali menjadi jami'iyah diniyyah ijtimai'iyah dalam Muktamar tersebut juga mentah. Apalagi NU sedang giat-giatnya memperjuangkan aspirasi rakyat dari represi Orde Baru lewat PPP. Namun pada praktiknya, kelompok kritis dari kalangan NU mengalami penggusuran sehingga menurunkan kadar perjuangan dari partai tersebut.

Misi kembali ke khittah kembali nyaring ketika para ulama berkeliling mengonsolidasikan NU. Bersamaan dengan langkah para kiai tersebut, KH Achmad Siddiq menyusun tulisan komprehensif yang berisi tentang pokok-pokok pikiran tentang pemulihan Khittah NU 1926. Tulisan ini dirembuk secara terbatas dengan para ulama sepuh di kediaman KH Masykur di Jakarta.

Secara garis besar, pedoman berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Muqaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 tersebut, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krupyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.



Ketika NU Kembali ke Khittah 1926 di mana NU tidak lagi menjadi partai politik atau bagian dari partai politik dan tidak terikat oleh partai politik manapun, dengan sendirinya masyarakat yang selama ini cara berpolitiknya ditentukan oleh pimpinan pusat organisasi mengalami banyak kebingungan.

Mengingat adanya perubahan politik dari stelsel kelompok atau organisasi menjadi stelsel individual ini, NU merasa perlu memberi petunjuk agar warganya tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertanggung jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984, Muktamar NU tahun 1989 merumuskan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.

Dengan demikian keterlibatan warga NU dengan partai politik yang ada bersifat individual, tidak atas nama organisasi, karena NU telah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan yang mengurus masalah sosial, pendidikan dan dakwah. Namun demikian NU mengimbau pada warganya agar melakukan politik secara benar dan bertanggung jawab dan dengan cita-cita menegakkan akhlaqul karimah dan dijalankan dengan proses yang selalu berpegang pada prinsip akhlaqul karimah.

Mengingat pentingnya politik sebagai sebuah sarana perjuangan, di samping sarana sosial dan pendidikan, maka warga Nahdliyin diberikan tuntunan yang mudah dipahami dan sekaligus mudah dilaksanakan. Melalui sembilan pedoman berpolitik warga NU ini diharapkan kaum Nahdliyin bisa menjadi



teladan dalam menjalankan politik, di mana norma dan etika selalu dikedepankan.

Walaupun untuk mencapai cita-cita itu penuh halangan, terutama dengan tumbuhnya pragmatisme dewasa ini. Namun demikian prinsip perlu ditegakkan walaupun mungkin dianggap tidak relevan, tetapi ini merupakan misi abadi yang harus ditegakkan bersama dengan menegakkan agama, karena warga Nahdliyin telah berikrar untuk mengintegrasikan perjuangannya dalam perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang dicanangkan dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarah mufakat dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama.

Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-



Munawwir Krapyak, Yogyakarta, dilansir NU Online:²⁰

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁰ Patoni. 9 Pedoman Berpolitik Warga NU <https://www.nu.or.id/fragmen/9-pedoman-berpolitik-warga-nu-3MqAg>. (8 Agustus 2018). Diakses Sabtu, 11 Mei 2024.



5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati,
serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan



aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

6. Tradisi dan Lingkungan Pesantren Nahdlatul Ulama

Ada ungkapan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan pesantren besar, sedangkan pesantren merupakan miniatur NU, dan dibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, hal ini maklum karena Nahdlatul Ulama lahir dari rahim pesantren lewat pemikiran dan gagasan para ulama saat itu dalam memikirkan nasib bangsa dan umat dari kolonialisme dan isu keagamaan yang memanas saat itu. Jauh sebelum Indonesia Merdeka, pesantren sudah ada dan banyak dijumpai di berbagai daerah secara sporadik, Lembaga tertua sekaligus asli (genuine) Nusantara ini ditaksir muncul pertama kali pada abad ke-16 lewat tradisi kiai yang mengajarkan berbagai kitab khususnya kitab teologi, fikih, dan tasawuf. Eksistensi pesantren dengan segala ragam dan keunikannya sebenarnya merupakan penopang sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian dan kekhasan pesantren disamping sebagai khazanah tradisi budaya bangsa Indonesia juga merupakan kekuatan penyanga pilar pendidikan untuk memunculkan pemimpin bangsa yang bermoral²¹.

Pola pengajaran yang diterapkan di pesantren secara dominan adalah aspek *ubudiyah* (religious oriented), karena secara umum pesantren didirikan dengan berbagai tujuan, di antaranya ialah 1) untuk membekali santri untuk bisa memahami

²¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).



teks-teks agama dengan mendalam (*tafaqquh fi al-din*), 2) menyebarluaskan dakwah dan syiar agama Islam (*nasyr al- da'wah alislami*) kepada masyarakat luas, 3) menjadi benteng pertahanan umat sekaligus role model dalam bidang akhlak.

Secara etimologis, pondok pesantren berasal dari dua kata "pondok" dan "pesantren". Pondok memiliki arti tempat khusus (asrama-asrama) para santri yang dibuat dari bambu, atau terserap dari kata bahasa Arab yaitu *funduq*, yang berarti penginapan atau asrama. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid, pesantren berakar pada kata "santri" yang berasal dari bahasa Sansekerta yaitu "sastri" yang berarti melek huruf.

Hal di atas berdasarkan pada fakta sosial bahwa pesantren merupakan kelas literasi (melek huruf), yaitu lembaga atau asrama yang terdiri dari orang-orang yang berusaha mendalami kitab-kitab keagamaan yang bertuliskan bahasa Arab. Dalam pendapat lain diungkapkan, bahwa pesantren berasal dari kata dasar "santri" yang diimbuhinya awalan "pe" dan akhiran "an". Dalam bahasa Jawa, santri sering disebut dengan *cantrik* yang berarti orang yang selalu menurut dan mengikuti gurunya .

Hadirnya pesantren setidaknya didorong oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai respon dari gejala sosial yang berkembang pada waktu dan tempat di mana pesantren tersebut berdiri. Dalam hal ini, munculnya pesantren tidak hanya di



lingkungan yang suasana keagamaannya sudah kuat dan mentradisi, justru banyak dijumpai pesantren lahir dan tumbuh di lingkungan yang minus wawasan dan kehidupan keagamaannya. Di samping itu, pesantren tumbuh dari kultur yang melatarbelakanginya, seperti halnya kultur Pendidikan putra-putri kiai pesantren yang tentu pula ditempa pendidikan agama di pesantren orangtuanya sendiri atau pesantren lain, sehingga regenerasi melahirkan ulama dan mendirikan pesantren baru.

Secara terminologis, pesantren merupakan institusi sosial keagamaan yang menjadi wahana pendidikan bagi umat Islam yang ingin mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Pondok pesantren dalam terminologi keagamaan merupakan institusi Pendidikan Islam. Meski demikian pondok pesantren mempunyai ikon sosial yang memiliki pranata sosial di masyarakat. Hal ini karena pondok pesantren memiliki modal sosial yang khas, yaitu: (1) ketekahan sang kiai, (2) para santri, (3) independensi dan kemandirian, dan (4) jaringan sosial yang kuat antar alumni pondok pesantren.²²

Pelaku utama pesantren adalah kiai dan santri (dimana para santri berada di bawah didikan dan bimbingan kiai). Istilah “santri” dalam khazanah kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya umat Islam mempunyai dua makna. *Pertama*, menunjuk pada sekelompok orang yang mengenyam sebuah pendidikan pesantren. *Kedua*, menunjuk pada akar budaya

²²Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Suatu Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997).



sekelompok pemeluk agama Islam yang taat menjalankan peribadatan.

Dalam perjalanan berikutnya, perkembangan pendidikan pesantren ke sistem madrasah secara berangsur-angsur muncul ke permukaan terutama sejak terjadinya pergantian zaman dari abad ke-19 menuju abad ke-20. Dengan sistem klasikal, pendidikan madrasah diperkenalkan di dalam pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal, sedangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam formal.

Dalam kriteria tertentu, madrasah di pesantren merupakan lembaga pembelajaran sekolah ala Belanda yang bermuatan pendidikan keagamaan. Yang melatarbelakangi hal tersebut adalah pesatnya sekolah-sekolah Belanda yang mengadopsi pendidikan sistem barat, dan berpengaruh bagi pesantren untuk mendirikan madrasah walaupun pada kenyataannya sistem kepengajaran model madrasah sudah diterapkan dalam dunia Islam kisaran abad ke-9 dan ke-10 M di bagian Timur Tengah. Pesantren yang berusaha untuk mengembangkan kelembagaan madrasah, menuntut pengasuh (kiai) untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik yang dating dari pemerintah maupun persyaratan teknis lainnya sebagai konsekuensi diterimanya sistem baru akibat kebijakan pemerintah.

Selanjutnya figur kiai yang berpengaruh dan memiliki



kharisma tinggi cukup menjadi modal awal untuk penggalangan dana pembangunan pesantren atau madrasah. Para pengikut atau jamaah biasanya datang bergantian untuk menyumbangkan harta atau tenaganya. Gotong-royong seperti ini sangat mungkin dilakukan oleh masyarakat yang berkultur agraris²³²³. Sampai sekitar akhir abad ke-19 M, pesantren merupakan satu-satunya sistem pendidikan Islam di Indonesia, baru kira-kira awal abad ke-20 M sistem pendidikan Islam mengalami perubahan searah dengan kecenderungan modernisasi. dalam jama'ah keagamaan berubah ke arah hubungan rasional-fungsional. Bersamaan dengan runtuhnya basis ekonomi agraris dunia pesantren, terjadi migrasi para santri dan orang-orang desa ke kawasan perkotaan untuk berebut posisi dalam sistem pendidikan modern.²⁴

Tidak hanya model pendidikan di pesantren yang dikembangkannya selalu menarik perhatian, tetapi juga perilaku kehidupan masyarakat di dalamnya. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menyebut bahwa pesantren sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia.²⁵ Keunikan dan kekhasan pesantren ditunjukkan juga

²³ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 219– 220. DAN Hamdan Farchan & Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta, Pilar Media, 2005).

²⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Cet. II (Yogyakarta: Sipress, 1999), 54.

²⁵ Abdurahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 1988), 14.



oleh kemampuan bertahannya dari berbagai arus modernisasi yang melanda di segala bidang kehidupan.

Pesantren selalu menjadi bagian penting dalam dinamika pendidikan keagamaan di Indonesia. Tidak hanya itu, pesantren dalam catatan sejarahnya sanggup memberikan warna dan pilihan bagi sejarah perubahan sosial di negeri ini. Kehidupan dalam pesantren selalu menggambarkan kehidupan masyarakat yang damai, masyarakat yang selalu hidup berlandaskan moral keagamaan yang menghargai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Di dalam pesantren terdapat berbagai unsur yang kemudian membentuk komponen pesantren, antara lain: kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Menurut Zamakhsyari Dhofier²⁶ kelima unsur itu menjadi elemen dasar dari tradisi pesantren. Kelima elemen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, dimana kyai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, disamping sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning, dia juga merangkap sebagai imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan, seperti: shalat berjamaah, wiridan, dan sebagainya.

Dalam teori Abdurrahman Wahid, unsur-unsur yang membentuk pesantren tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri.

²⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 44-66.



Peranan kiai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang. Pola kebudayaan yang terbentuk tercipta sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi yang muncul sebagai implikasi logis dari pola relasi dan fungsionalisme yang terjalin dalam komunitas pesantren.

Pola tradisi dari karakter masyarakat pesantren yang terejawantahkan dalam sikap sehari-hari santri kepada kiai selain dilatarbelakangi oleh tuntutan ajaran pekerti (akhlak) yang dipelajari lewat kitab-kitab akhlak dan tasawuf, pengaruh figur kiai juga menentukan pola ini, sehingga kultus kepada kiai dan keluarganya sangatlah tinggi. Namun selain dua faktor tersebut, ada indikator lain yang mempengaruhi watak dan perilaku masyarakat pesantren, yaitu budaya aristokrat yang diwariskan oleh bangsa priyayi keraton (khusunya jawa), karena keberadaan pesantren sebagian merupakan alih fungsi dari kerajaan-kerajaan Nusantara masa lalu, dan banyak ditemukan fakta pula bahwa genealogi nasab (keturunan) kiai pesantren tersambung kepada kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di masa silam.

Predikat Kiai, selalu berhubungan dengan gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan yang diberikan secara sukrela kepada ulama Islam sebagai pimpinan masyarakat. Sebutan kiai tidak diterima dari pendidikan formal, tetapi sebutan tersebut datang dari masyarakat, kerena melihat kedalaman ilmu, kekuatan spiritualnya, genealogi (silsilah keluarga) dan



moralitas. Kiai dalam masyarakat Jawa Islam tradisional, merupakan tokoh keagamaan karismatik. Sedangkan dalam kosa kata kiai dinisbahkan pada kata “ulamâ” (bentuk jamak dari kata ‘âlim) artinya orang yang berilmu. Dengan pengertian aslinya, yang dimaksud ulama adalah para ilmuan, baik dalam bidang agama, sosial dan kealaman. Menurut Quraisy Shihab ada empat tugas utama yang harus dijalankan kiai sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan kitab suci: pertama; menyampaikan (*tablîgh*) ajaran-ajaran sesuai dengan perintah Allah. Kedua: menjelaskan ajaran agama berdasarkan al-Qur’ân. Ketiga, memutuskan perkara atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.²⁷

Para kiai dengan kelebihan ilmu pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Sedangkan Nurcholis Madjid menyebutkan sejak abad pertengahan umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada para kiai pada masyarakat Jawa. Ada dua kategori di dalamnya. Peran pertama, kelompok kiai yang peran sosial yang berada pada jalur “al-da’wah wa al-tarbîyah” (jalur pendidikan

²⁷ M. Syamsul Huda, *Kultus Kiai: Sketsa Tradisi Pesantren*, Jurnal Fak.Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya



informal/pesantren). Peran kedua, kiai yang kedudukannya serta peran sosial keagamaanya berada pada jalur al-Tashîri wa al-Qadâ (aktivitas sosial keagamaan dalam bidang hakim yang menyangkut hukum Islam (*sharî'ah*)). Jadi tidak heran, apabila kiai dalam satu sisi berperan sebagai pemimpin umat dan pewaris para *anbiyâ'*, sementara di sisi lain masyarakat memandang kiai sebagai pribadi unggul, terutama dalam bidang ilmu dan amal sehingga mempunyai martabat dan wibawa di hadapan masyarakat.

Dalam kerangka sosiologis, sebutan atau penghargaan terhadap kiai, sesungguhnya merupakan pengakuan alamiah dari masyarakat. Pengakuan itu, bukan berarti tidak didasari oleh sebuah proses yang panjang ditinjau dari jasa dan pengabdian kiai dalam masyarakat. Roland Alan melihat bahwa munculnya pengakuan masyarakat terhadap kiai dipengaruhi oleh empat faktor: pertama, silsilah (geneutika intelectual). Garis keturunan nenek moyang kiai merupakan penentu pengakuan dari masyarakat. Kedua, faktor kedalaman ilmu (deep knowledge). Faktor ini turut mempengaruhi pernghormatan terhadap kiai. Ketiga, ketinggian budi pekertinya, kearifan, keikhlasan, ketawadu'an, kejujuran serta kesabaran juga menjadi tolok ukur masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap kiai. Keempat, faktor karomah Allah. Wujud karomah itu dapat berbentuk Ilmu Laduni, dapat memindahkan hujan, bentuk-bentuk keajaiban lain serta ilmu ketabiban (seperti mengobati kemasukan jin, stress, memberikan ijâzah atau doa). Bentuk



pengakuan masyarakat dalam hal ini, sifatnya terapi kejiwaan yaitu meminta barokah. Selain faktor-faktor tersebut, dalam simpul pikiran santri tentang keagungan derajat kiai, seringkali santri terjebak dalam etika yang dinilai terlalu mengkultuskan dan berlebihan (*ghuluw*) seperti berjalan dengan menggunakan lutut di hadapan kiai, sistem santri *khadam* (pembantu) di rumah pribadi kiai untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, dan sikap-sikap lain yang tidak ada tuntutannya dalam kitab yang diajarkan sekalipun. Dalam kitab *ta'lim wa al-muta'allim* yang menjadi rujukan populer di pesantren terkait (akhlik) dijelaskan bahwa etika seorang santri kepada guru (kiai) sebagaimana berikut:

وَمِنْ تَوْقِيرِ الْمُعْلِمِ أَنْ لَا يَمْشِي أَمَامَهُ، وَلَا يَجْلِسْ مَكَانَهُ، وَلَا يَبْتَدَئْ بِالْكَلَامِ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَكْثُرُ الْكَلَامَ عَنْهُ، وَلَا يَسْأَلُ شَيْئًا عَنْ مَالَتِهِ وَبِرَاعِيِ الْوَقْتِ، وَلَا يَدْقُقُ الْبَابَ بَلْ يَصْبِرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْأَسْنَادُ

"Bahwa termasuk arti menghormati guru, yaitu jangan berjalan di depannya; duduk di tempatnya; memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya; berbicara macam-macam darinya; dan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah.²⁸

Pada keterangan lanjutan masalah "tidak boleh berjalan di

²⁸ As-Zarnuji, *Ta'lim Wa al-Muta'allim*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002)

depan guru” dijelaskan bahwa tidak boleh berjalan di depan guru atau tidak mendahului guru yang sedang berjalan. Jika hendak mendahului, hendaknya bungkukkan badan, menepi dan menundukkan pandangan ketika melewati guru. Di sini jelas tidak ada keterangan berjalan dengan menggunakan lutut seperti halnya abdi keraton.

Unsur cara berpikir santri juga menjadi embrio munculnya kultus kiai. Ekspresi kerangka itu dapat dilihat dari ilustrasi proses didaktik-metodik santri. Pertama, materi kitab yang ditawarkan di pesantren secara eksplisit mengarahkan santri pada pemikiran yang bersifat diametal, artinya memposisikan guru sebagai figur yang serba ideal dan santri sebagai individu pasif yang siap menerima apa yang diberikan oleh kiai. Misalnya pada kitab Ta‘lîm al- Muta‘allim, Nas}âih} al-‘Ibâd, Ih}yâ‘ ‘Ulûm al-Dîn, dan lain sebagainya. Secara literal isi kitab tersebut di atas, syarat dengan pesan nilai-nilai normatif yang ujungnya menggiring pemikiran santri pada tahapan opurtunis dan doktriner.

Biasanya meminjam istilah psikologi agama munculnya sugestibel santri, yaitu sikap kejiwaan yang mudah mengalami keterpesonaan terhadap sesuatu hal atau figur. Sikap mudah menerima dan terpesona terhadap sesuatu yang dimuliakan ini, seringkali yang menjadi landasan pemikiran santri di dalam melihat sesuatu yang bersumber dari pribadi kiai.

D. Penutup



Ditinjau dari cara penghormatan yang dilakukan oleh santri di pesantren serta pola kepemimpinan kiai yang menonjol peran individu, nampaknya terdapat kesamaan indikasi dengan praktik kultus ala aristokrat keraton, terlebih nampak pada relasi santri dan kiai dalam pergaulan sehari-hari yang bisa terukur lewat etika formal. Di antara indikasi kultus tersebut ialah: pertama, ketentuan pada doktrin dan norma yang dianjurkan oleh kiai berlaku secara total dan mengikat. Kebiasaan tersebut dapat disimak dari perilaku santri dalam proses belajar mengajar. Di mana santri secara subjektif menerima peran secara pasif ketika transformasi ilmu yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu kiai dan santri. Di sinilah bentuk kultus kiai yang dilakukan santri menampakkan wujud, terutama pada struktur dan konstruk pemikiran santri yang meniru gaya kiai, dengan cara mengabadikan ajaran sebagai doktrin yang mutlak



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, Cet. II (Yogyakarta: Sipress, 1999)
- Abdurahman Wahid, *Mengerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 1988)
- Ajie Najmuddin. *Inilah 45 Anggota DPR Partai NU Hasil Pemilu 1955.*
- As-Zarnuji, *Ta'lim Wa al-Muta'allim*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002)
- Desember 2020 ISSN 1412-0534, E ISSN 2442-8213 399 P. 399.
Hamdan Farchan & Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta, Pilar Media, 2005).
- Hasani Ahmad Said, dkk. *Harmonization of Culture and Religion: Comparison of Baduy and Nahdlatul Ulama Traditions*. Jurnal Al-Ulum Volume 20 Number 2
- Hasani Ahmad Said. *Islamic Relations, Local Tradition (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and The Ethnic Baduy) and Their Effects On Religious Life Patterns In Indonesia* Progressive Academic Publishing, UK Page 46 www.idpublications.org
- Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*; Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* jilid I dan II.
<https://jabar.nu.or.id/nasional/mengenal-9-pedoman-politik-warga-nu-XKpLQ> Rabu, 13 September 2023 | 10:00 WIB. Diakses Kamis, 9 Mei 2024.
<https://www.nu.or.id/fragmen/inilah-45-anggota-dpr-partai-nu-hasil-pemilu-1955- Xoebh>. Selasa, 27 Februari 2024 | 10:13 WIB. Diakses Kamis, 9 Mei 2024.
- Ibnu Qayim Ismail, *Kiai Penghulu Jawa: Perannya di Masa Kolonial* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai* (Malang: UIN Malang Press, 2007)
- Jafar ahmad, “*Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia*”, Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2022)



- Lathiful Khuluq, “*Fajar Kebangunann Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy’ari*” (Yogyakarta: LKIS, 2009)
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995)
- M. Syamsul Huda, *Kultus Kiai: Sketsa Tradisi Pesantren*, Jurnal Fak.Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Martin Van Bruinessen, NU, *Tradisi: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), p.168. Baca juga Achmad Warid. Fiqih politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan. *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 43 No. I, 2009.
- Masmuni Mahatma. *Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara*. Mawaizh Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 8, no. 1 (2017), pp. 45
- Muhammad Fahmi Hidayatullah, “*Underground Movement KH. Hasyim Asy’ari (Konsepsi, Interpretasi dan Aksi Politik Kaum Santri)*”, dalam Pusat Kajian Hasyim Asy’ari, Aktualisasi Pemikiran dan Kejuangan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2018)
- NU Online. Kilas NU dan Politik. <https://www.nu.or.id/opini/kilas-nu-dan-politik-q9jRI>. Diakses Ahad, 12 Mei 2024.
- NU Online. *Mengenal 9 Pedoman Politik Warga NU*.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesntren; Suatu Potret Perjalanan* (Jakarata: Paramadina, 1997).
- Patoni. 9 *Pedoman Berpolitik Warga NU* <https://www.nu.or.id/fragmen/9-pedoman-berpolitik-warga-nu-3MqAg>. (8 Agustus 2018). Diakses Sabtu, 11 Mei 2024.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)



Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018); Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Zainul Milal Bizawe. “*Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama Santri*”. (Tangerang: Yayasan Compass Indonesiatama, 2016)

Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES, 1982

